

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia yaitu dengan menguatnya tuntutan sistem tata kelola yang baik (*good corporate governance*) terhadap lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah khususnya dalam sektor pendidikan. Dengan munculnya semangat demokrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam aspek kehidupan merupakan cerminan dari reformasi di Indonesia.

Gerakan reformasi membawa keuntungan bagi masyarakat. Dengan kata lain, akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) akan menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan sistem tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dibutuhkan praktek dalam kerangka politik dan sosial, Wanyaman dan Burton (2009) dalam Fauzan (2014). Di bidang pendidikan terdapat hubungan erat antara sistem tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dengan akuntabilitas publik.

Kebijakan dalam pembangunan pendidikan meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan masyarakat luas. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan hak bagi setiap siswa yang disalurkan oleh pemerintah melalui sekolah untuk mendanai biaya operasional kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 meletakkan prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas publik, efisiensi, dan keadilan.

Dengan adanya program dana bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah dituntut untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan biaya pendidikan yang dikelola secara transparan kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan baik sangat berpengaruh

terhadap mutu pendidikan sekolah, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana maupun dengan sumber belajar siswa.

Namun dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) terkadang penyimpangan masih saja sering terjadi. Menurut penelitian Indonesia *corruption watch* (ICW) oleh Febri Diansyah dalam (Fauzan, 2014), secara nasional dengan sampel sekolah 3.237 pada 33 provinsi ditemukan nilai penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) lebih kurang Rp. 28 miliar. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai 13,6 juta dan terjadi pada 2.054 atau 63,5% dari total sampel sekolah yang diaudit. Data kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia periode 2004-2009 berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kerugian negara dalam kasus ini lebih kurang sebesar Rp. 12,8 miliar. Faktor penyebab penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, selain itu transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban belum diterapkan secara maksimal di sekolah.

Permasalahan lain yang sering terjadi yaitu kurangnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima oleh beberapa sekolah, kurangnya kemampuan guru menjadi bendahara dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS), pihak sekolah kurang tepat waktu dalam memberikan laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), serta masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban

penggunaan dana bantuan operasional sekolah diketahui oleh masyarakat (Kaswandi,2015). Untuk itu pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) perlu adanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Hasil penelitian yang mengkaji topik tentang penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang menghasilkan adanya temuan dari hasil penelitian yang berbeda atau *gaap* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2014) bahwa *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Sedangkan menurut May Nurhidayah dan Sarsiti (2017) bahwa *good corporate governance* mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pentingnya penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.
2. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu analisis penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu. Dalam penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), penulis menfokuskan kepada penerapan prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk memberi keyakinan mengenai kepada tingkat yang lebih tinggi, penulis juga melakukan wawancara terhadap tim manajemen BOS kabupaten yang secara langsung mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan penulis juga akan menganalisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) berdasarkan peraturan terkait dengan panduan pengelolaan yang berlaku.

1.5.2 Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini hanya untuk sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) tertinggi yang ada di kabupaten Luwu karena sekolah dasar yang ada di kabupaten Luwu jumlahnya 319 sekolah, Jika diteliti seluruhnya maka membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan pendekatan teori alternatif dalam *good corporate governance* dimana manajer dianggap sebagai orang-orang yang berfikir kolektif dan pro organisasi. Manajer diasumsikan sebagai *steward*/pelayan/agen. Dalam teori ini, menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi untuk kepentingan individu melainkan untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan kepadanya demi mencapai tujuan organisasi.

Menurut Gudono (2017:155) teori *stewardship* (teori pengelolaan) adalah cara menciptakan struktur organisasi yang bisa membantu manajer untuk membuat keputusan serta pilihan-pilihan tindakan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Teori ini menekankan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik serta tujuan utama *corporate governance* untuk menentukan mekanisme dan struktur yang memfasilitasi koordinasi yang efektif yang dapat dibentuk oleh kedua pihak dan asumsi yang harus digaris bawahi dalam teori ini adalah tingkah laku manajer sejalan dengan pemilik atau *stakeholder*.

2.2 *Good Corporate Governance*

2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Konsep *good corporate governance* berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap

semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Defenisi *good corporate governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Peraturan Menteri BUMN, 2011).

OECD (*The Organization for Economic Corporation and Development*) dalam Sutojo dan Aldridge (2019:2) mengemukakan *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga dapat mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholders* non-pemegan saham. *Good corporate* juga menyetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan dewan pengurus *board of directors* dan direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.

Menurut Sulistyanto (2008:9) *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*.

Menurut Sohib (2016:29) *good corporate governance* merupakan:

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
- b. Suatu sistem *check and balance* mencakup pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.

- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerja.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang dapat mengatur dan mengelola suatu kegiatan perusahaan atau organisasi untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal.

2.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governnce*

Untuk mewujudkan konsep dan penerapan *good corporate governance* yang efektif dan efisien, ada lima prinsip yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri BUMN yaitu:

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*) adalah keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. Konsep ini berguna untuk menjaga objektivitas suatu perusahaan atau korporasi dalam menjalankan bisnis, yaitu dengan menyediakan informasi terbuka, jelas, mudah diakses, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tidak mengambil inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang menyangkut proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dianggap penting oleh *stakeholders*.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Konsep ini dibutuhkan untuk menganalisis sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu korporasi atau perusahaan. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan dalam memberi kejelasan mengenai struktur,

fungsi, sistem, dan elemen penting lainnya kepada *stakeholders*, terhadap hasil pencapaian perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam konsep ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggungjawab terhadap *stakeholders* internal saja, tetapi juga bertanggungjawab kepada *stakeholders* eksternal.
4. Kemandirian (*Independency*), adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Konsep ini mendorong perusahaan untuk profesional dalam mengelola bisnis sehingga tidak terjadi konflik kepentingan, bisa menciptakan kemandirian dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Selain itu, perusahaan juga harus mampu menciptakan nilai-nilai (*values*) agar dapat menciptakan daya saing.
5. Kesetaraan/Kewajaran (*Fairness*), adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Konsep ini menuntut hadirnya perlakuan yang adil dan bijaksana dalam rangka memenuhi hak-hak *stakeholder* yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Prinsip ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memberikan jaminan perlakuan adil terhadap pihak-pihak para pemangku kepentingan.

2.2.3 Tujuan *Good Corporate Governnce*

Good corporate governance mempunyai lima macam tujuan utama (Sutojo dan Aldridge, 2019:5) yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non-pemegang saham,
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,
4. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2.2.4 Manfaat *Good Corpotrte Governance* (GCG)

Badan Pengelolaan Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan publik secara sehat, telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan secara tidak transparan kepada pemegang saham, insvestor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Sutojo dan Aldridge, 2019:13)

2.3 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.3.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut perauran Mentei Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada sekolah-sekolah. Bantuan tersebut di kelola oleh sekolah guna membiayai operasional sekolah agar biaya operasional tersebut tidak di bebaskan pada siswa

2.3.2 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Secara khusus bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat, (permendikbud, 2019).

2.3.3 Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam dapodik. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional, (permendikbud, 2019)

2.3.4 Penelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Perencanaan dana bantuan operasional sekolah yaitu:

- a. Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap disertai dengan dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah yaitu

rencana anggaran sekolah (RKAS), buku kas, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan dokumen lain yang diperlukan.

b. Sekolah harus menyusun laporan lengkap dengan melakukan rekapitulasi penggunaan dana BOS.

2. Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Proses penerimaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) secara langsung dari pusat ke rekening sekolah maka sekolah harus memverifikasi data rekening sekolah yang digunakan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta verifikasi jumlah siswa dari tiap satuan pendidikan.

3. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah harus kesepakatan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sebagai sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, disamping dana yang di terima dari pemerintah maupun dari sumber lain yang sah. Dari hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam berita acara yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

4. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni membiayai komponen kegiatan-kegiatan antara lain pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan,

langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran, dan biaya lain jika komponen 1 sampai 10 telah terpenuhi (kemendikbut, 2019).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah nonpersonalia sesuai dengan prioritas utama kebutuhan sekolah, yang meliputi:

1. Pengembangan perpustakaan seperti: membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru, untuk mengganti buku yang rusak atau mencukupi kekurangan jumlah buku, langganan publikasi berkala, akses informasi *online*, pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga pustakawan, pengembangan *database* perpustakaan, pemeliharaan perabot perpustakaan, dan pembelian AC perpustakaan.
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik seperti: administrasi pendaftaran, penggandaan formulir, pembelian ATK dalam rangka penerimaan peserta didik baru, pendaftaran ulang, penyediaan konsumsi, biaya pemasukan validasi, pemuktahiran data dan pengiriman data pokok pendidikan, biaya publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti: pembelajaran kontekstual, pengembangan pendidikan karate, pembelajaran remedial, pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat atau

pemerintah daerah, kesenian karya ilmiah, pramuka, usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja (PMR), pendidikan lingkungan hidup.

4. Kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti: ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ujian sekolah dan lain-lain.
5. Pengelolaan sekolah seperti: alat tulis kantor (buku tulis, kapur tulis, pulpen, pensil, spidol, kertas, tinta *printer*, CD, *flashdisk*, penggandaan, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku investaris, minuman dan makanan untuk kebutuhan sehari-hari sekolah, pengadaan suku cadang alat kantor, alat-alat kebersihan sekolah, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan bantuan operasional sekolah dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana bantuan operasional sekolah di bank serta biaya transportasi pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS).
6. Pengembangan profesi guru seperti: kegiatan kelompok kerja guru, menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan untuk mengadakan kegiatan pelatihan di sekolah.
7. Layanan daya dan jasa seperti: listrik, air, telepon, internet baik dengan cara langsung maupun prabayar, pembiayaan penggunaan internet termasuk pemasangan baru, pembelian genset atau jenis lainnya untuk daerah pedalaman jika tidak ada jaringan listrik.

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah seperti: pengecatan , perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, saluran air hujan, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
 9. Pembayaran honorarium untuk guru honorer dan tenaga kependidikan honorer seperti: guru honorer, pegawai administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, dan pegawai kebersihan.
 10. Pembelian dan perawatan alat multi media pembelajaran seperti: membeli *computer desktop/ work station, printer/ printer plus scanner, laptop*, dan proyektor dan lain-lain.
 11. Jika komponen 1s.d 10 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari bantuan operasional sekolah (BOS) dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, biaya anak miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah langsung (seperti KIT, BLT, bantuan seragam sekolah dan lain-lain), mebel sekolah, dan peralatan untuk UKS, (Kemendikbud, 2019:32-41).
5. Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan dengan cara, tim manajemen BOS sekolah harus melaporkan semua penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan kementerian secara *online*.

2.4 Penelitian terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Fauzan (2014) Pengaruh penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap perilaku etis dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah	Variabel independen: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kemandirian. Variabel dependen: perilaku etis.	Deskriptif kuantitatif	Keadilan (<i>fairness</i>) mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perilaku etis. Di sisi lain menunjukkan bahwa transpaansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perilaku etis
2.	Gede Andreyan Semara Bhawa, Iyus Akhmad Haris, dan Made Artana (2014) Efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di	Variabel independen: perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Variabel dependen: bantuan operasional sekolah.	Deskriptif kuantitatif	Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2013 pada seluruh sekolah di kecamatan sukasada sudah baik dan efektif

	kecamatan Sukasada.			karena sudah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2013.
3.	Mariska Angraini (2015) pengaruh partisipasi (ta'awun), transparansi (balagha), dan akuntabilitas (mas'uliyah) dana BOS SD Negeri di Desa Gajah Mati terhadap kinerja (amaliyah) sekolah.	Variabel independen: partisipasi (ta'awun), transparansi (balagha), dan akuntabilitas (mas'uliyah). Variabel dependen: kinerja (amaliyah) sekolah.	Deskriptif Kuantitatif	Secara simultan dan parsial, partisipasi (ta'awun), transparansi (balagha), dan akuntabilitas (mas'uliyah) dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD Negeri di Desa Gajah Mati berpengaruh signifikan terhadap kinerja

				(amaliyah) sekolah.
4.	Muhammad Andi, Murniati AR, dan Nasir Usman (2015) Efektivitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di kabupaten Pidie.	Variabel independen: program, strategi pengawasan penggunaan. Variabel dependen: dana bantuan operasional sekolah (BOS).	Deskriptif kualitatif	Program, strategi dan pengawasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di kabupaten Pidie sudah dikategorikan baik.
5.	Neni Sumarni (2015) Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMPN 6 SATAP Rambah Samo.	Variabel independen: penggunaan, pembukuan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan. Variabel dependen: dana bantuan operasional sekolah (BOS).	Deskriptif kualitatif	pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMPN 6 SATAP Rambah Samo dapat dikategorikan terlaksana cukup baik, untuk itu perlu kiranya bagi pengelola untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS agar mendapat hasil yang baik.
6.	Nurul Hariswati (2015) Analisis	Variabel independen:	Deskriptif kuantitatif	Realita implementasi di

	akuntabilitas dan transparansi tentang implementasi kebijakan pengelolaan BOS.	akuntabilitas, transparansi. Variabel dependen: implementasi kebijakan.		satuan pendidikan sangat berbeda dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam sebuah petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan bantuan operasional sekolah (BOS)
7.	Muhammad Firyal Akbar (2016) Evaluasi kebijakan program pemberian dana bantuan operasional sekolah (studi kasus pada sekolah dasar di kabupaten Mamuju Utara).	Variabel independen: efektifitas, kecukupan, perataan, responsivitas. Variabel dependen: ketepatan program pemberian dana bantuan operasional sekolah.	Deskriptif kualitatif	Evaluasi program pemberian dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar di kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa program ini sudah dijalankan dengan cukup baik dan dapat dilanjutkan, namun masih ada catatan menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini sehingga diperlukan kajian ulang untuk

				keberhasilan dan maksimalan dari tujuan program dana bantuan operasional sekolah (BOS) itu sendiri.
8.	Tika Dwi Wahyuningsih (2016) Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombang kabupaten Kebumen tahun ajaran 2015/2016.	Variabel independen: pengelolaan, penggunaan, dan sasaran. Variabel dependen: dana bantuan operasional sekolah (BOS).	Deskriptif kuantitatif	Prosedur pengelolaan, penggunaan, dan sasaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombang kabupaten Kebumen tahun ajaran 2015/2016 telah sesuai dengan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS).
9.	Wahida (2016) Implementasi sistem manajemen keuangan pendidikan dalam pengelolaan dana BOS di SMA Muhammadiyah 5 Makassar.	Variabel independen: penerapan sistem manajemen. Variabel dependen: pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.	Deskriptif kualitatif	Penerapan sistem manajemen keuangan di SMA Muhammadiyah 5 Makassar sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan

				<p>fungsi-fungsi manajemen keuangan dalam memanfaatkan keterbatasan dana yang dimiliki sebagai langkah dalam optimalisasi penerapan sistem manajemen keuangan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sudah berjalan sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).</p>
10.	<p>Anisa Rahayu, dan Endang Larasati setianingsih (2017) Pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah dasar (SD) di Dinas Pendidikan</p>	<p>Variabel independen: pelaksanaan, pengawasan. Variabel Dependen: dana bantuan operasional sekolah (BOS)</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan</p>

	kabupaten Temanggung.			kabupaten Temanggung pelaksanaan sudah berjalan baik.
11.	Kadek Sutrisna, Putu Sukma Kurniawan, dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2017) Pengaruh tingkat pendidikan pengelolaan keuangan, pengendalin intern akuntansi, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah (studi empiris pada SMA/SMK Negeri di kabupaten Buleleng)	Variabel independen: tingkat pendidikan, pengendalian intern akuntansi, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Variabel dependen: efektivitas pengelolaan keuangan Sekolah	Deskriptif kuantitatif	Tingkat pendidikan, pengendalian intern akuntansi, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan keuangan sekolah pada SMA/SMK Negeri di kabupaten Buleleng.
12.	May Nurhidayah dan Sarsiti (2017) Analisis penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Sragen Bilingual Bording School	Variabel independen: <i>tranparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness.</i> Variabel dependen: pengelolaan dana	Deskriptif kuantitatif	Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda, penerapan <i>good corporate governance</i> di SMP Negeri Sragen <i>Bilingual</i>

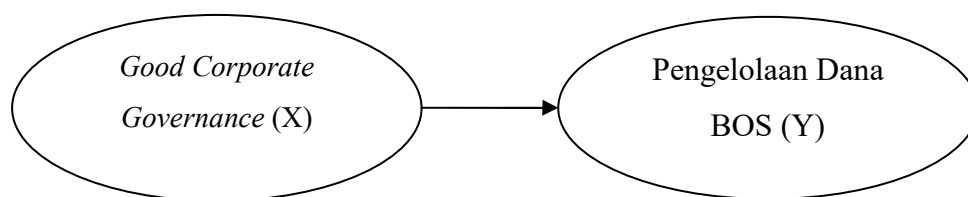
	(SBBS)	BOS.		<i>Bording School</i> (SBBS) menunjukkan hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan karena dilihat dari prinsip dari <i>good corporate governance</i> belum diterapkan dengan baik dalam pengelolaan dana BOS.
13.	Silele, Harijanto Sabiono, dan Rudi J. Pusung (2017) Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), studi kasus pada SD Inpres 4 desa Akediri kecamatan Jailolo kabupaten Halmahera Barat	Variabel independen: perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Variabel dependen: dana bantuan operasional sekolah.	Deskriptif kualitatif	perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana bantuan operasional sekolah (BOS) nomor 80 tahun 2015 tetapi penggunaan dana operasional

				sekolah (BOS) pada sekolah dasar Inpres 4 Halmahera Barat tidak sesuai dengan petunjuk teknis dana bantuan operasional sekolah (BOS) nomor 80 tahun 2015.
14.	Subkhi Widyatmoko dan Suyatmini (2017) Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SD Kemas I Surakarta	Variabel independen: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Variabel dependen: pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.	Deskriptif kualitatif	Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar (SD) di Kemas Surakarta telah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2013.
15.	Barsani Bss, Muchran BI, dan Asri Jaya (2018) Analisis dana bantuan operasional	Variabel independen: meningkatkan kualitas kelengkapan fasilitas sekolah.	Deskriptif kualitatif	Dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat meningkatkan

sekolah (BOS) dalam meningkatkan kualitas kelengkapan fasilitas sekolah di SMP Negeri 3 Makassar.	Variabel dependen: dana bantuan operasional sekolah.		kualitas kelengkapan fasilitas sekolah di SMP Negeri 3 Makassar
---	--	--	---

2.5 Kerangka konseptual

Berdasarkan landasan teori mengenai *good corporate governance* maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



2.6 Hipotesis

Bedasarkan kerangka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diduga bahwa Penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan, (Sugiyono,2017:8).

Menurut Sugiyono (2017:35) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel yang lain.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari populasi atau sampel penelitian yang berupa kutipan data, gambaran kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau peristiwa yang diamati, kemudian dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan. Metode penelitian ini hanya sebatas menganalisis penelitian dalam bidang pendidikan dan berusaha mendeskripsikan analisis penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

Dilihat dari penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Penelitian ini berusaha memperoleh gambaran/data

dari sumber data yaitu kepala sekolah dan bendahara dana bantuan operasional sekolah, guru, dan komite sekolah.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu yang berfokus pada sekolah dasar yang menerima dan mengelola dana BOS. Waktu dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu pada bulan Juli, dan Agustus 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017:80).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sekolah dasar (SD) di kabupaten Luwu dengan jumlah 319 sekolah.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purpositive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kreteria yang ditentukan (Sugiyono, 2017:81).

Beberapa kreteria yang digunakan untuk memilih sampel yang representatif adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten Luwu dengan status sekolah negeri.

2. Sekolah Dasar (SD) yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten Luwu dengan jumlah di atas tiga ratus siswa.
3. Sekolah Dasar (SD) yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten Luwu dengan jumlah dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima di atas dua ratus lima puluh juta rupiah/tahun.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini berupa hasil dari observasi lapangan, wawancara, dan pengisian kuesioner mengenai penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diisi oleh kepala sekolah, bendahara dana BOS, guru, staf, serta komite sekolah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:137). Dimana data sekunder ini merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Data tersebut adalah data yang berbentuk buku laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: studi lapangan atau observasi langsung ke lapangan dimana obyek observasinya yaitu keadaan dan perilaku yang ada di lingkungan sekolah dasar (SD). Kuesioner atau angket dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada seluruh responden yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, staf tata usaha, serta ketua komite sekolah. Kemudian wawancara (*interview*) dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan bendahara bantuan operasional sekolah (BOS).

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

a. Variabel independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017:39). variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* (X)

b. Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana bantuan operasional sekolah (Y).

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel penerapan *good corporate governance* (GCG) yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan/kewajaran (*fairness*). Dari lima indikator tersebut diperoleh sepuluh pertanyaan. Sedangkan indikator untuk pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu perencanaan, penerimaan, pelaksanaan, penggunaan, dan pelaporan. Dari lima indikator tersebut diperoleh sepuluh pertanyaan.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel (X)	Indikator	No. Item	Jumlah Soal
1	<i>Good corporate governance</i> (GCG)	1. Transparansi (<i>Transparenc</i>) 2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) 3. Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>) 4. Kemandirian (<i>Independency</i>) 5. Kesetaraan/Kewajaran (<i>Fairness</i>).	1,2 3,4 5,6 7,8 9,10	2 2 2 2 2
	Variabel (Y)	Indikator	No. Item	Jumlah Soal
2	Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)	1. Perencanaan 2. Penerimaan 3. Pelaksanaan 4. Penggunaan 5. Pelaporan	1,2 3,4 5,6 7, 8 9,10	2 2 2 2 2
Jumlah				20

3.6.2 Definisi Operasional

a. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

b. Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan kepada suatu sekolah oleh pemerintah daerah/Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam rangka membebaskan iuran siswa. Bantuan tersebut dikelola oleh sekolah guna membiayai operasional sekolah agar biaya operasional tersebut tidak dibebankan pada siswa.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2017:102). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah *kuesioner* (Angket), dengan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2017:93) “skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”. Pertanyaan yang dijawab oleh responden mendapat nilai sesuai dengan alternatif jawaban yang bersangkutan. Kreteria penelitian dari pertanyaan tersebut memiliki lima alternatif jawaban yaitu nilai Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Kurang Setuju (KS) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.

3.8 Analisis Data

1. Uji Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2017:267). Cara yang akan digunakan dalam uji validitas adalah dengan analisa item, dimana setiap nilai yang ada pada butir pertanyaan untuk suatu variabel dengan menggunakan korelasi *product moment* dengan bantuan fasilitas komputer program *statistical package for social sciences* (SPSS) versi 23 *for windows*. Syarat minimum untuk dianggap valid adalah nilai r hitung $>$ dari nilai r tabel (sugiyono, 2017: 128).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006). Reliabilitas menunjukkan pada tingkat keandalan (dapat dipercaya) dari suatu indikator yang digunakan dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan *riable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas menggunakan teknik rumus *alpha* dan dibantu fasilitas komputer SPSS versi 23 *for windows*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $>$ 0.60 (Gozali, 2009).

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi linear sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap (Sugiyono, 2017:188).

Secara matematis model analisis regresi sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + bx + e$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (pengelolaan dana BOS)

a = Koefisien regresi (konstanta)

b = Koefisien regresi *good corporate governance*

X = Variabel Independen (*good corporate governance*)

e = Tingkat kesalahan/error

b. Pengaruh X terhadap Y secara parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah variabel independen yaitu *good corporate governance* (X) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu dana BOS (Y) secara parsial. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan

menggunakan SPSS dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 5%.adalah :

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara variabel yang diuji.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila koefisien determinasi $R^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali ($= 0\%$) terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi $R^2 = 1$, berarti variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas.

Letak R^2 berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan $0 \leq R^2 \leq 1$. Besarnya koefisien determinasi variabel terikat dapat diketahui dari skor tabel *coefficient*. Secara parsial variabel bebas terhadap atau kuadrat *partial correlation* dari koefisien determinasi secara simultan diperoleh dari besarnya R^2 atau *adjusted R square*. Nilai *adjusted R square* yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. “nilai yang mendekati 1 berarti variabel bebas

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat”(Ghozali, 2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, tingkat sekolah dasar disebut sebagai *europesche lagere school* (ELS). Kemudian pada masa penjajahan Jepang, disebut dengan sekolah rakyat (SR). Setelah Indonesia merdeka, sekolah rakyat (SR) berubah menjadi sekolah dasar (SD) pada tanggal 13 Maret 1946. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu enam tahun, mulai dari kelas satu sampai kelas enam. Saat murid kelas enam diwajibkan mengikuti ujian nasional (UN) yang mempengaruhi kelulusan siswa sehingga siswa dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP). Siswa pelajar sekolah dasar (SD) pada umumnya berusia enam sampai dua belas tahun. Sekolah dasar dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah dasar negeri (SDN) di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, yang kemudian dimekarkan lagi menjadi kabupaten Luwu Timur dan kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan kota Palopo selaku pemerintah otonom kota Palopo di bawah kepemimpinan

bupati Luwu Dr. Kamrul Kasim yang menjabat bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003. Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai ibu kota kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh bupati H. M. Basmin mattayang kemudian dilakukan pemilihan kepala daerah langsung pertama dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 kemudian H. M. Basmin Mattayang terpilih kembali untuk periode 2019-2024.

Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni kota Palopo, adapun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS. Luas wilayah kabupaten luwu 3.000,25 km² yang terdiri dari 22 kecamatan, 20 kelurahan dan 207 desa dengan jumlah penduduk sebesar 375.535 jiwa. Jumlah sekolah dasar (SD) yang ada di kabupaten Luwu sebanyak 319. Dari 319 sekolah di kabupaten Luwu, Dinas pendidikan menaungi 273 sekolah sedangkan untuk Depertemen Agama menaungi berjumlah 46 sekolah.

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purpositive sampling* dengan beberapa kreteria sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten Luwu dengan status sekolah negeri.

2. Sekolah Dasar (SD) yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten Luwu dengan jumlah di atas tiga ratus siswa.
3. Sekolah Dasar (SD) yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten Luwu dengan jumlah dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima di atas dua ratus lima puluh juta rupiah/tahun.

Pada sampel penelitian ini diperoleh delapan sampel sekolah dasar (SD) yang terdapat di kabupaten Luwu. Adapun sekolah yang akan diteliti yaitu:

Tabel 4.1. Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Sekolah	Jumlah Dana BOS Diterima/Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Guru/Tenaga Pendidik
1	SD NEGERI 60 PONRANG	Rp. 265.180.000,-	332	18
2	SD NEGERI 62 LARE-LARE	Rp.273.440.000,-	343	18
3	SD NEGERI 21 TADDETTE	Rp. 290.720.000,-	363	20
4	SD NEGERI 65 BUA	Rp. 326.880.000,-	408	20
5	SD NEGERI 22 BELOPA	Rp.337.920.000,-	426	20
6	SD NEGERI 229 LAMUNRE	Rp. 340.990.000,-	427	20
7	SD NEGERI 231 PADANG ASSOMPERENG	Rp. 429.600.000,-	537	23
8	SD NEGERI 25 RADDA	Rp.439.360.000,-	552	24

Sumber: Data diolah tahun 2020

1. SD Negeri 60 Ponrang

SD Negeri 60 Ponrang merupakan suatu lembaga pendidikan formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu beralamatkan di desa Tirowali kecamatan. Ponrang kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan. SD Negeri 60 Ponrang berdiri sejak tahun 1965 di atas tanah seluas 2.670 m²

dengan status kepemilikan yaitu hak milik. SD Negeri 60 Ponrang memiliki 11 rombel dengan jumlah siswa 332 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD Negeri 60 Ponrang dikelola oleh guru dan pegawai sebanyak 18 orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas berjumlah 8 orang, guru mata pelajaran (mapel) berjumlah 5 orang, tenaga administrasi sekolah berjumlah 1 orang, tenaga perpustakaan berjumlah 1 orang, dan penjaga sekolah berjumlah 1 orang, dan petugas keamanan berjumlah 1 orang.

2. SD Negeri 62 Lare-Lare

SD Negeri 62 Lare-Lare merupakan suatu lembaga pendidikan formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu beralamatkan di desa Lare-Lare kecamatan Bua kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan. SD Negeri 62 Lare-Lare berdiri sejak tahun 1960 dengan status kepemilikan yaitu hak milik. SD Negeri 62 Lare-lare memiliki 17 rombel dengan jumlah siswa 343 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD Negeri 62 Lare-Lare dikelola oleh guru dan pegawai sebanyak 18 orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas berjumlah 8 orang, guru mata pelajaran (mapel) berjumlah 5 orang, tenaga administrasi sekolah berjumlah 1 orang, tenaga perpustakaan berjumlah 1 orang, dan penjaga sekolah berjumlah 1 orang, dan petugas keamanan berjumlah 1 orang.

3. SD Negeri 21 Taddette

SD Negeri 21 Taddette merupakan suatu lembaga pendidikan formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu beralamatkan di Jl. Topoka

kelurahan Senga kecamatan Belopa kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan. SD Negeri 21 Taddete berdiri sejak tahun 1910 di atas tanah seluas 3.780 m² dengan status kepemilikan yaitu hak milik. SD Negeri 21 Taddette memiliki 12 rombel dengan jumlah siswa 363 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD 21 Taddete dikelola oleh guru dan pegawai sebanyak 20 orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas berjumlah 11 orang, guru mata pelajaran (mapel) berjumlah 5 orang, tenaga administrasi sekolah berjumlah 1 orang, tenaga perpustakaan berjumlah 1 orang, dan penjaga sekolah berjumlah 1 orang.

4. SD Negeri 65 Bua

SD Negeri 65 Bua merupakan suatu lembaga pendidikan formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu beralamatkan di Jl. To Sau kelurahan Sakti kecamatan Bua kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan. SD Negeri 65 Bua berdiri sejak tahun 1961 dengan status kepemilikan yaitu hak milik. dan SD Negeri 65 Bua memiliki 12 rombel dengan jumlah siswa 408 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD 65 Bua, dikelola oleh guru dan pegawai sebanyak 20 orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas berjumlah 13 orang, guru mata pelajaran (mapel) berjumlah 4 orang, tenaga administrasi sekolah berjumlah 1 orang, dan penjaga sekolah berjumlah 1 orang.

5. SD Negeri 22 Belopa

SD Negeri 22 Belopa merupakan suatu lembaga pendidikan formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu beralamatkan di Jl. Topoka

kelurahan Tanamanai kecamatan Belopa kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan. SD Negeri 22 Belopa Berdiri sejak tahun 1951 di atas tanah seluas 2.021 m² dengan status kepemilikan yaitu hak milik dan memiliki 15 rombel dengan jumlah siswa 426 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD 22 Belopa, dikelola dengan oleh guru dan pegawai sebanyak 20 orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas berjumlah 12 orang, guru mata pelajaran (mapel) berjumlah 4 orang, Tenaga administrasi sekolah berjumlah 1 orang, tenaga perpustakaan berjumlah 1 orang, dan penjaga sekolah berjumlah 1 orang.

6. SD Negeri 229 Lamunre

SD Negeri 229 Lamunre merupakan suatu lembaga pendidikan formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu beralamatkan di Jl. Sungai Paremang kelurahan Sabe kecamatan Belopa Utara kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan. SD Negeri 229 Lamunre berdiri sejak tahun 1965 di atas tanah seluas 2.110 m² dengan status kepemilikan yaitu hak milik dan memiliki 14 rombel dengan jumlah siswa 427 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD Negeri 229 Lamunre, dikelola oleh guru dan pegawai sebanyak 20 orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas berjumlah 10 orang, guru mata pelajaran (mapel) berjumlah 5 orang, Tenaga administrasi sekolah berjumlah 1 orang, tenaga perpustakaan berjumlah 1 orang, dan penjaga sekolah berjumlah 1 orang, dan petugas keamanan berjumlah 1 orang.

7. SD Negeri 231 Padang Assompereng

SD Negeri 231 Padang Assompereng merupakan suatu lembaga pendidikan formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu beralamatkan di Jl. Pelita kelurahan Padang Sappa kecamatan Ponrang kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan. SD Negeri 231 Padang Assompereng berdiri sejak tahun 1973 di atas tanah seluas 3.488 m² dengan status kepemilikan yaitu hak milik dan memiliki 20 rombel dengan jumlah siswa 537 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD Negeri 231 Padang Assompereng, dikelola oleh guru dan pegawai sebanyak 23 orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas berjumlah 12 orang, guru mata pelajaran (mapel) berjumlah 6 orang, tenaga administrasi sekolah berjumlah 1 orang, tenaga perpustakaan berjumlah 1 orang, dan penjaga sekolah berjumlah 1 orang, dan petugas keamanan berjumlah 1 orang.

8. SD Negeri 25 Radda

SD Negeri 25 Radda merupakan suatu lembaga pendidikan formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu beralamatkan di Jl. Gunung Latimojong kelurahan Tampumia Radda kecamatan Belopa kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan. SD Negeri 25 Radda berdiri sejak tahun 1953 di atas tanah seluas 3.180 m² dengan status kepemilikan yaitu hak milik dan memiliki 19 rombel dengan jumlah siswa 552 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD Negeri 25 Radda, dikelola oleh guru dan pegawai sebanyak 24 orang yang terdiri dari kepala

sekolah, guru kelas berjumlah 14 orang, guru mata pelajaran (mapel) berjumlah 5 orang, tenaga administrasi sekolah berjumlah 1 orang, tenaga perpustakaan berjumlah 1 orang, dan penjaga sekolah berjumlah 1 orang, dan petugas keamanan berjumlah 1 orang.

4.1.2 Deskripsi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tiap sekolah diperoleh presentase alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebagai berikut:

1. SD Negeri 60 Ponrang

Tabel 4.2 Penggunaan Dana BOS Tiap Jenis Anggaran Tahun 2019

No.	Penggunaan Dana BOS	Jumlah Dana (Rp)	Presentase
1.	Pengembangan perpustakaan	Rp.29.749.700	11,2%
2.	Penerimaan peserta didik baru	Rp. 1.832.500	0,7%
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 6.370.000	2,4%
4.	Kegiatan evaluasi dan pembelajaran	Rp. 59.004.000	22,3%
5.	Pengelolaan sekolah	Rp. 32.055.800	12,1%
6.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah	Rp. 21.900.000	8,3%
7.	Langganan daya dan jasa	Rp. 16.458.000	6,2%
8.	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 55.800.000	21,0%
9.	Pembayaran honor	Rp. 30.000.000	11,3%
10.	Pembelian dan perawatan alat multi media pembelajaran	Rp. 10.960.000	4,1%
11.	Biaya lainnya jika komponen 1 s.d 10 telah terpenuhi	Rp. 1.050.000	0,4%

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa alokasi terbesar penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 60 Ponrang

yaitu kegiatan evaluasi dan pembelajaran sebesar Rp. 59.004.000 atau 22,3%, dari jumlah uang yang digunakan karena untuk menunjang kualitas siswa dimana kegiatan ini meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas dan USBN. Kemudian disusul pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 55.800.000 atau 21% untuk menunjang kelayakan dan kenyamanan proses belajar siswa.

2. SD Negeri 62 Lare-Lare

Tabel 4.3 Penggunaan Dana BOS Tiap Jenis Anggaran Tahun 2019

No.	Penggunaan Dana BOS	Jumlah Dana (Rp)	Presentase
1.	Pengembangan perpustakaan	Rp. 50.140.300,-	18,3%
2.	Penerimaan peserta didik baru	Rp. 1.300.000,-	0,5%
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 15.090.000,-	5,5%
4.	Kegiatan evaluasi dan pembelajaran	Rp. 28.930.200,-	10,6%
5.	Pengelolaan sekolah	Rp. 47.550.000,-	17,4%
6.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah	Rp. 17.074.000,-	6,2%
7.	Langganan daya dan jasa	Rp. 20.846.500,-	6,7%
8.	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 42.111.000,-	15,4%
9.	Pembayaran honor	Rp. 38.340.000,-	14,0%
10.	Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran	Rp. 10.838.000,-	4,0%
11.	Biaya lainnya jika komponen 1s.d 10 telah terpenuhi	Rp. 1.220.000,-	0,4%

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa alokasi terbesar penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 62 Lare-Lare

yaitu pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 50.140.300 atau 18,3%, dari jumlah uang yang digunakan karena menyediakan buku teks pelajaran sesuai kurikulum dan meningkatkan kompetensi perpustakaan serta mencegah kekurangan buku agar rasio satu buku satu siswa. Kemudian disusul pengelolaan sekolah sebesar Rp. 47.550.000 atau 17,4%, kegiatan ini untuk pengadaan laporan dan surat menyurat, insentif bagi tin penyusun laporan dana BOS, biaya transportasi kegiatan sekolah dan pertemuan dalam rangka penyusunan RKAS. Sedangkan biaya penggunaan dana BOS terendah yaitu biaya lain-lain sebesar Rp. 1.220.000 atau 0,4%.

3. SD Negeri 21 Taddette

Tabel 4.4 Penggunaan Dana BOS Tiap Jenis Anggaran Tahun 2019

No.	Penggunaan Dana BOS	Jumlah Dana (Rp)	Presentase
1.	Pengembangan perpustakaan	Rp. 52.148.100,-	17,9%
2.	Penerimaan peserta didik baru	Rp. 6.625.000,-	2,3%
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 35.070.000,-	12,1%
4.	Kegiatan evaluasi dan pembelajaran	Rp. 27.182.100,-	9,3%
5.	Pengelolaan sekolah	Rp. 78.106.849	26,9%
6.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah	Rp.10.871.000,-	3,7%
7.	Langganan daya dan jasa	Rp.4.756.951,-	1,6%
8.	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 35.180.000,-	12,1%
9.	Pembayaran honor	Rp. 32.940.000,-	11,3%
10.	Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran	Rp. 7.840.000,-	2,7%
11.	Biaya lainnya jika komponen 1 s.d 10 telah terpenuhi	Rp.	0,0%

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa alokasi terbesar penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD 21 Taddette yaitu pengelolaan sekolah sebesar Rp. 78.106.849 atau 26,9% dari jumlah uang yang digunakan. Kegiatan ini untuk pengadaan laporan dan surat menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan dana BOS, biaya transportasi kegiatan sekolah dan pertemuan dalam rangka penyusunan RKAS. Disusul pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 52.148.100 atau 17,9% dari jumlah uang yang digunakan karena menyediakan buku teks pelajaran sesuai kurikulum dan meningkatkan kompetensi perpustakaan serta mencegah kekurangan buku di sekolah. Kemudian disusul pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 35.180.000 atau 12,1% dan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp. 35.070.000 atau 12,1%, serta pembayaran honor sebesar Rp. 32.940.000 atau 11,3%. Untuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) paling rendah yaitu pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah Rp. 10.871.000 atau 3,7 %, pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran Rp. 7.840.000 atau 2,7%, dan penerimaan peserta didik baru Rp. 6.6250.000 atau 2,3%, serta langganan daya dan jasa sebesar Rp. 4.756.951 atau 1,6%. Sedangkan SD Negeri 21 Taddette penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2019 tidak digunakan untuk komponen biaya lainnya.

4. SD Negeri 65 Bua

Tabel 4.5 Penggunaan Dana BOS Tiap Jenis Anggaran Tahun 2019

No.	Penggunaan Dana BOS	Jumlah Dana (Rp)	Present ase
1.	Pengembangan perpustakaan	Rp. 70.305.000,-	21,5%
2.	Penerimaan peserta didik baru	Rp.7.437.140,-	2,3%
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp.10.230.000,-	3,1%
4.	Kegiatan evaluasi dan pembelajaran	Rp. 27.070.250	8,3%
5	Pengelolaan sekolah	Rp. 55.463.350,-	17,0%
6.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah	Rp. 3.750.000,-	1,1%
7.	Langganan daya dan jasa	Rp. 13.814.760,-	4,2%
8.	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 79.269.500,-	24,3%
9.	Pembayaran honor	Rp. 29.850.000,-	9,1%
10.	Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran	Rp. 6.940.000,-	2,1%
13.	Biaya lainnya jika komponen 1 s.d 10 telah terpenuhi	Rp. 22.750.000,-	7%

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa alokasi terbesar penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 65 Bua yaitu pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 79.269.500 atau 24,3%, dari jumlah uang yang digunakan, karena untuk perawatan dan perbaikan sarana prasarana untuk menunjang kenyamanan proses belajar siswa. Kemudian disusul pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 70.305.000 atau 21,5% dari jumlah uang yang digunakan karena untuk menyediakan buku teks pelajaran sesuai kurikulum dan meningkatkan kompetensi perpustakaan serta mencegah kekurangan buku agar rasio satu

buku satu siswa, serta disusul pengelolaan sekolah sebesar Rp. 55.463.350 atau 17% kegiatan ini untuk pengadaan laporan dan surat menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan dana BOS, biaya transportasi kegiatan sekolah dan pertemuan dalam rangka penyusunan RKAS. Sedangkan alokasi paling kecil yaitu pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah sebesar Rp.3.750.000 atau 1,1% . Alokasi ini kecil karena pengembangan profesi guru seperti diklat, seminar, dan pelatihan itu disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran.

5. SD Negeri 22 Belopa

Tabel 4.6 Penggunaan Dana BOS Tiap Jenis Anggaran Tahun 2019

No.	Penggunaan Dana BOS	Jumlah Dana (Rp)	Presentase
1.	Pengembangan perpustakaan	Rp. 84.557.100,-	25,0%
2.	Penerimaan peserta didik baru	Rp. 2.050.000,-	0,6%
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 39.639.000,-	11,7%
4.	Kegiatan evaluasi dan pembelajaran	Rp. 8.385.000,-	2,5%
5.	Pengelolaan sekolah	Rp. 57.923.150,-	17,1%
6.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah	Rp. 1.950.000,-	0,6%
7.	Langganan daya dan jasa	Rp. 12.951.100	3,8%
8.	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 79.458.000,-	23,5%
9.	Pembayaran honor	Rp. 40.587.000,-	12,0%
10.	Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran	Rp. 10.419.650,-	3,1%
13.	Biaya lainnya jika komponen 1 s.d 10 telah terpenuhi	Rp. -	0,0%

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa alokasi terbesar penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 22 Belopa yaitu pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 84.557.100 atau 25% dari jumlah uang yang digunakan karena menyediakan buku teks pelajaran sesuai kurikulum dan meningkatkan kompetensi perpustakaan serta mencegah kekurangan buku agar rasio satu buku satu siswa. Kemudian disusul pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 79.458.000 atau 23,5% dari jumlah uang yang digunakan, karena untuk perawatan dan perbaikan sarana prasarana untuk menunjang keamanan proses belajar siswa. Serta disusul oleh pengelolaan sekolah sebesar Rp. 57.923.150 atau 17,1% kegiatan ini untuk pengadaan laporan dan surat menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan dana BOS, biaya transportasi kegiatan sekolah dan pertemuan dalam rangka penyusunan RKAS. dan pembayaran honor sebesar 40.587.000 atau 12% serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp. 39.639.000 atau 11.7%. sedangkan untuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) paling rendah yaitu penerimaan peserta didik baru sebesar Rp. 2.050.000 atau 0,6% dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah sebesar Rp. 1.950.000 atau 0,6% dari jumlah uang yang digunakan. Sedangkan SD Negeri 22 Belopa penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2019 tidak digunakan untuk komponen biaya lainnya.

6. SD Negeri 229 Lamunre

Tabel 4.7 Penggunaan Dana BOS Tiap Jenis Anggaran Tahun 2019

No.	Penggunaan Dana BOS	Jumlah Dana (Rp)	Presentase
1.	Pengembangan perpustakaan	Rp. 57.146.100,-	16,8%
2.	Penerimaan peserta didik baru	Rp. 2.736.250,-	0,8%
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 22.925.000,-	6,7%
4.	Kegiatan evaluasi dan pembelajaran	Rp. 35.160.900,-	10,3%
5.	Pengelolaan sekolah	Rp.107.263.350,-	31,5%
6.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah	Rp. 17.650.250,-	5,2%
7.	Langganan daya dan jasa	Rp. 11.596.250,-	3,4%
8.	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 35.411.900,-	10,4%
9.	Pembayaran honor	Rp. 39.600.000,-	11,6%
10.	Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran	Rp. 11.500.000,-	3,4%
11.	Biaya lainnya jika komponen 1 s.d 10 telah terpenuhi	Rp. -	0,0%

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa alokasi terbesar penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD 229 Lamunre yaitu pengelolaan sekolah sebesar Rp. 107.263.350 atau 31,5% dari jumlah uang yang digunakan. Kegiatan ini untuk pengadaan laporan dan surat menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan dana BOS, biaya transportasi kegiatan sekolah dan pertemuan dalam rangka penyusunan RKAS. Disusul pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 57.146.100 atau 16,8% dari jumlah uang yang digunakan karena menyediakan buku teks pelajaran sesuai kurikulum dan meningkatkan kompetensi perpustakaan serta mencegah

kekurangan buku agar rasio satu buku satu siswa. Kemudian disusul pembayaran honor sebesar Rp. 39.600.000 atau 11,6%, serta disusul pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 35.411.900 atau 10,4% dan kegiatan evaluasi dan pembelajaran sebesar Rp. 35.160.900 atau 10,3% . Sedangkan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 229 Lamunre tidak digunakan untuk komponen biaya lainnya.

7. SD Negeri 231 Padang Assompereng

Tabel 4.8 Penggunaan Dana BOS Tiap Jenis Anggaran Tahun 2019

No.	Penggunaan Dana BOS	Jumlah Dana (Rp)	Presentase
1.	Pengembangan perpustakaan	Rp. 112.314.000,-	26,1%
2.	Penerimaan peserta didik baru	Rp. 1.575.000,-	0,04%
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 32.544.000,-	7,6%
4.	Kegiatan evaluasi dan pembelajaran	Rp. 73.092.611,-	17,0%
5.	Pengelolaan sekolah	Rp. 71.545.414,-	16,7%
6.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah	Rp. 30.852.657,-	7,2%
7.	Langganan daya dan jasa	Rp. 7.800.664,-	1,8%
8.	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 26.671.472,-	6,2%
9.	Pembayaran honor	Rp. 56.400.000,-	13,1%
10.	Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran	Rp. 16.804.182,-	3,9%
11.	Biaya lainnya jika komponen 1 s.d 10 telah terpenuhi	Rp. -	0,0%

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa alokasi terbesar penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 231 Padang Assompereng yaitu pengembangan perpustakaan sebesar Rp.112.314.000 atau

26,1%, dari jumlah uang yang digunakan. Kemudian disusul kegiatan evaluasi dan pembelajaran sebesar Rp. 73.092.611 atau 17% serta pengelolaan sekolah sebesar Rp. 71.545.414 atau 16,7%, kegiatan ini untuk pengadaan laporan dan surat menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan dana BOS, biaya transportasi kegiatan sekolah dan pertemuan dalam rangka penyusunan RKAS. Sedangkan untuk SD 231 Padang Assompereng penggunaan dana bantuan operasional sekolah tidak digunakan untuk komponen biaya lainnya.

8. SD Negeri 25 Radda

Tabel 4.9 Penggunaan Dana BOS Tiap Jenis Anggaran Tahun 2019

No.	Penggunaan Dana BOS	Jumlah Dana (Rp)	Presentase
1.	Pengembangan perpustakaan.	Rp. 71.789.200	16,3%
2.	Penerimaan peserta didik baru.	Rp. 4.285.000	1,0%
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.	Rp. 54.847.000	12,5%
4.	Kegiatan evaluasi dan pembelajaran.	Rp. 44.563.450	10,1%
5.	Pengelolaan sekolah.	Rp. 142.967.801	32,5%
6.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah.	Rp. 16.732.000	3,8%
7.	Langganan daya dan jasa.	Rp. 28.691.549	6,5%
8.	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah.	Rp. 16.594.000	3,8%
9.	Pembayaran honor.	Rp. 50.190.000	11,4%
10.	Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran.	Rp. 8.700.000	2,0%
11.	Biaya lainnya jika komponen 1 s.d 10 telah terpenuhi.	Rp.-	0,0%

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa alokasi terbesar penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD 25 Radda yaitu

pengelolaan sekolah sebesar Rp. 142.967.801 atau 32,5% kegiatan ini untuk pengadaan laporan dan surat menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan dana BOS, biaya transportasi kegiatan sekolah dan pertemuan dalam rangka penyusunan RKAS. Kemudian disusul pengembangan perpustakaan sebesar Rp.71.789.200 atau 16,3% dari jumlah uang yang digunakan karena menyediakan buku teks pelajaran sesuai kurikulum dan meningkatkan kompetensi perpustakaan serta mencegah kekurangan buku agar rasio satu buku satu siswa. Serta disusul kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp. 54.847.000 atau 12,5% dan kegiatan evaluasi dan pembelajaran sebesar Rp. 44.563.450. Sedangkan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 25 Radda tidak digunakan untuk komponen biaya lainnya.

4.1.3 Karakteristik Responden

Subjek penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, bendahara dana BOS, dewan guru, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan, serta komite sekolah. Dari delapan sekolah di kabupaten Luwu yang diteliti antara lain SD Negeri 60 Ponrang, SD Negeri 62 Lare-Lare, SD Negeri 21 Taddette, SD Negeri 65 Bua, SD Negeri 22 Belopa, SD Negeri 29 Lamunre, SD Negeri 231 Padang Assompereng, SD Negeri 25 Radda, akan tetapi pada saat dilakukan penelitian beberapa dewan guru tidak dapat diteliti karena tidak berada di sekolah pada saat pengambilan data, mereka berhalangan hadir dengan alasan ada yang sakit dan ada yang sedang tugas diluar sehingga responden yang dapat diteliti sebanyak 163 orang warga sekolah. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin dan jenis PTK (Penelitian Tindakan Kelas) sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu menguraikan atau menggambarkan jenis kelamin responden. Hal ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu pria dan wanita. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Pria	30	18,4%
Wanita	133	81,6%
Total	163	100%

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yaitu pria berjumlah 30 orang atau 18,4%. Sedangkan wanita berjumlah 133 orang atau 81,6% yang mendominasi penelitian ini. Sebagian besar wanita menjadi guru di sekolah dasar (SD) dikarenakan wanita langsung berhubungan dengan anak-anak bukan hanya untuk diajar tetapi juga diasuh.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan PTK (Penelitian Tindakan Kelas)

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu menguraikan atau menggambarkan jenis PTK (Penelitian Tindakan Kelas) responden. Hal ini di kelompokkan menjadi 8 kelompok yaitu kepala sekolah, bendahara dana BOS, guru kelas, guru mapel, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan komite sekolah. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis PTK (Penelitian Tindakan Kelas)

PTK	Frekuensi	Presentase (%)
Kepala Sekolah	8	4,9%
Bendahara Dana BOS	8	4,9%
Guru Kelas	86	52,8%
Guru Mapel	36	22,1%
Tenaga Administrasi	9	5,5%
Tenaga Perpustakaan	8	4,9%
Komite Sekolah	8	4,9%
Total	163	100%

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yaitu kepala sekolah berjumlah 8 orang atau 4,9%, bendahara berjumlah 8 orang atau 4,9%, guru kelas berjumlah 86 orang atau 52,8%, guru mapel berjumlah 36 orang atau 22,1%, tenaga administrasi berjumlah 9 orang atau 5,5 %, tenaga perpustakaan 8 orang atau 4,9%, dan komite sekolah 8 orang atau 4,9%.

4.1.4 Analisis Deskripsi Data

Hasil olahan data primer yang merupakan gambaran hasil penelitian berdasarkan jawaban responden mengenai analisis penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu. Deskripsi statistik berdasarkan setiap variabel diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel *Good Corporate Governance*(X)

Sebaran jawaban responden terhadap setiap item pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12 Deskripsi Data Responden Terhadap Variabel *Good Corporate Governance* (X)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	Total
1	Pengambilan keputusan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan dana BOS dilakukan secara terbuka.	0	0	0	58	105	163
2	Pihak sekolah melibatkan para guru, dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dana BOS.	0	5	25	92	41	163
3	pihak sekolah menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan dana BOS kepada, pemerintah, komite, dan pihak berkepentingan lainnya.	0	1	15	107	40	163
4	Pihak sekolah siap menjawab pertanyaan dari <i>sakeholders</i> berkaitan dengan dana BOS.	0	1	6	91	65	163
5	Pihak sekolah membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS setiap triwulan.	0	0	3	42	118	163
6	Pihak sekolah membuat pembukuan secara tertib sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS.	0	0	1	48	114	163
7	Pihak sekolah membentuk Tim BOS sekolah yang berkompeten dalam pengelolaan dana BOS.	0	0	0	99	64	163
8	Dalam mengelola dana BOS Pihak sekolah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.	0	1	0	79	83	163
9	Dalam pengelolaan dana BOS Pihak sekolah menghindari tekanan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan.	1	3	1	100	58	163
10	Komite sekolah diberikan kesempatan untuk mengajukan saran saat penyusunan RKAS.	0	0	12	105	46	163

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui bahwa distribusi frekuensi jawaban variabel *good corporate governance* (X) dari 163 responden pada pertanyaan 1 yang setuju (S) 58 responden, dan sangat setuju (SS) 105 responden. Pertanyaan 2 yang tidak setuju (TS) 5 responden, kurang setuju (KS) 25 responden, setuju (S) 92 responden, dan sangat setuju (SS) 41 responden. Pertanyaan 3 yang tidak setuju (TS) 1 responden, kurang setuju (KS) 15 responden, setuju (S) 107 responden, dan sangat setuju (SS) 40 responden. Pertanyaan 4 yang tidak setuju (TS) 1 responden, kurang setuju (KS) 6 responden, setuju (S) 91 responden, dan sangat setuju (SS) 65 responden. Pertanyaan 5 yang kurang setuju (KS) 3 responden, setuju (S) 42 responden, dan sangat setuju (SS) 118 responden. Pertanyaan 6 yang kurang setuju (KS) 1 responden, setuju (S) 48 responden, dan sangat setuju (SS) 114 responden. Pertanyaan 7 yang setuju (S) 99 responden, dan sangat setuju (SS) 64 responden. Pertanyaan 8 yang tidak setuju (TS) 1 responden, setuju (S) 79 responden, dan sangat setuju (SS) 83 responden. Pertanyaan 9 yang sangat tidak setuju (STS) 1 responden, tidak setuju (TS) 3 responden, kurang setuju (KS) 1 responden, setuju (S) 100 responden, dan sangat setuju (SS) 58 responden. Pertanyaan 10 yang kurang setuju (KS) 12 responden, setuju (S) 105 responden, dan sangat setuju (SS) 46 responden.

2. Variabel Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Y)

Sebaran jawaban responden terhadap setiap item pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13 Deskripsi Data Responden Terhadap Variabel Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Y)

No.	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	Total
1	Pihak sekolah membuat RKAS pada awal tahun ajaran.	0	0	9	75	79	163
2	RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dibuat oleh tim manajemen BOS	0	0	0	87	76	163
3	Jumlah dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah sudah sesuai dengan jumlah siswa yang ada.	0	0	1	117	45	163
4	Proses pengambilan dana BOS melalui rekening sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah.	0	0	1	94	68	163
5	Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di sesuaikan dengan hasil rapat yang telah disepakati dalam RKAS.	0	0	2	41	120	163
6	Pada saat pelaksanaan penggunaan dana BOS akan tetapi kegiatan mengalami perubahan maka sekolah membuat RKAS perubahan dan dilaporkan kembali ke pemerintah.	1	0	7	83	72	163
7	Penggunaan dana BOS sesuai dengan rencana anggaran	0	11	6	76	70	163
8	Dana BOS digunakan sesuai dengan komponen yang telah ditentukan dalam juknis penggunaan dana BOS.	0	0	5	56	102	163
9	Dana BOS dilaporkan secara forum setiap rapat sekolah.	0	8	42	73	40	163
10	Dana BOS dilaporkan secara <i>online</i> tiap tiga bulan sekali.	0	18	29	80	36	163

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, distribusi frekuensi jawaban variabel pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Y) dari 163 responden pada pertanyaan 1 yang kurang setuju (KS) 9 responden, setuju (S) 75 responden, dan sangat setuju (SS) 79 responden. Pertanyaan 2 yang setuju (S) 87

responden, dan sangat setuju (SS) 76 responden. Pertanyaan 3 yang kurang setuju (KS) 1 responden, setuju (S) 117 responden, dan sangat setuju (SS) 45 responden. Pertanyaan 4 yang kurang setuju (KS) 1 responden, setuju (S) 94 responden, dan sangat setuju (SS) 68 responden. Pertanyaan 5 yang kurang setuju (KS) 2 responden, setuju (S) 41 responden, dan sangat setuju (SS) 120 responden. Pertanyaan 6 yang sangat tidak setuju (STS) 1 responden, kurang setuju (KS) 7 responden, setuju (S) 83 responden, dan sangat setuju (SS) 72 responden. Pertanyaan 7 yang tidak setuju (TS) 11 responden, kurang setuju (KS) 6 responden, setuju (S) 76 responden, dan sangat setuju (SS) 70 responden. Pertanyaan 8 yang kurang setuju (KS) 5 responden, setuju (S) 56 responden, dan sangat setuju (SS) 102 responden. Pertanyaan 9 yang tidak setuju (TS) 8 responden, kurang setuju (KS) 42 responden, setuju (S) 73 responden, dan sangat setuju (SS) 40 responden. Pertanyaan 10 yang tidak setuju (TS) 18 responden, kurang setuju (KS) 29 responden, setuju (S) 80, responden, dan sangat setuju (SS) 36 responden.

4.1.5 Hasil Analisis Data

1. Uji Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2017:267). Cara yang akan digunakan dalam uji validitas adalah dengan analisa item, dimana setiap nilai yang ada pada butir pertanyaan untuk suatu variabel dengan menggunakan korelasi *product moment* dengan bantuan fasilitas komputer program *Statistical Package For Social Sciences* (SPSS)

versi 23 *For Windows*. Syarat minimum untuk dianggap valid adalah nilai r hitung $>$ dari nilai r tabel (sugiyono, 2017: 128).

Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel *Good Corporate Governance* (GCG)

Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
GCG1	0,491	0,129	Valid
GCG2	0,478	0,129	Valid
GCG3	0,520	0,129	Valid
GCG4	0,626	0,129	Valid
GCG5	0,419	0,129	Valid
GCG6	0,480	0,129	Valid
GCG7	0,526	0,129	Valid
GCG8	0,596	0,129	Valid
GCG9	0,324	0,129	Valid
GCG10	0,524	0,129	Valid

Sumber: Data lampiran

Untuk mengukur nilai validitas GCG (X) ditentukan dengan melihat nilai dengan jumlah responden yaitu 163 responden sehingga nilai pada tabel *product moment* dan didapat nilai $r = 0,129$. Jika hasil validitas berada di atas 0,129 maka dianggap butir pernyataan atau instrumen sudah valid. Hasil analisis validitas untuk semua instrumen pada variabel GCG (X), hasil analisisnya di atas $r = 0,129$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 10 skor pernyataan atau instrumen pada variabel GCG (X) tersebut dinyatakan valid dan sudah layak untuk dijadikan pengukuran variabel penelitian.

Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana BOS

Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
DANA BOS1	0,501	0,129	Valid
DANA BOS2	0,528	0,129	Valid
DANA BOS3	0,362	0,129	Valid
DANA BOS4	0,472	0,129	Valid
DANA BOS5	0,322	0,129	Valid
DANA BOS6	0,426	0,129	Valid
DANA BOS7	0,675	0,129	Valid
DANA BOS8	0,542	0,129	Valid
DANA BOS9	0,617	0,129	Valid
DANA BOS10	0,662	0,129	Valid

Sumber: Data lampiran

Untuk mengukur nilai validitas pengelolaan dana BOS (Y) ditentukan dengan melihat nilai dengan jumlah responden yaitu 163 responden sehingga nilai pada tabel *product moment* dan didapat nilai $r = 0,129$. Jika hasil validitas berada di atas 0,129 maka dianggap butir pernyataan atau instrumen sudah valid. Hasil analisis validitas untuk semua instrumen pada variabel pengelolaan dana BOS (Y), hasil analisisnya di atas $r = 0,129$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 10 skor pernyataan atau instrumen pada variabel pengelolaan dana BOS (Y) tersebut dinyatakan valid dan sudah layak untuk dijadikan pengukuran variabel penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006). Reliabilitas menunjukkan pada tingkat keandalan (dapat dipercaya) dari suatu indikator yang digunakan dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan *riable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas menggunakan teknik rumus alpha dan dibantu fasilitas komputer SPSS versi 23 *For Windows*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Gozali, 2009).

Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas *Good Corporate Governance* (X)

Case Processing Summary				Reliability Statistics	
		N	%	Cronbach's Alpha	N of Items
Cases	Valid	163	100.0	.652	10
	Excluded ^a	0	.0		
	Total	163	100.0		

a. Listwise Deletion Based On All Variables In The Procedure.

Sumber : Hasil olah data dari SPSS 23, 2020

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas pada kuesioner variabel GCG (X) dengan nilai *Cronbach's Alpha* atau *r Alpha* sebesar 0,652. Hal ini membuktikan kuesioner adalah reliabel (dapat diandalkan) karena *r Alpha* yang bernilai lebih besar dari 0,600. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan) sebagai alat pengukuran variabel *good corporate governance* (GCG).

Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabilitas Pengelolaan Dana BOS (Y)

Case Processing Summary			Reliability Statistics	
	N	%	Cronbach's Alpha	N of Items
Valid	163	100.0	.698	10
Cases Excluded ^a	0	.0		
Total	163	100.0		

a. Listwise Deletion Based On Allvariables In The Procedure.

Sumber : Hasil olah data dari SPSS 23, 2020

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, hasil pengujian reliabilitas pada kuesioner variabel pengelolaan dana BOS (Y) dengan nilai *Cronbach's Alpha* atau *r Alpha* sebesar 0,698. Hal ini membuktikan kuesioner adalah reliabel karena *r Alpha* yang bernilai lebih besar dari 0,600. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan) sebagai alat pengukur variabel pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas pada kuesioner variabel GCG (X) dengan nilai *Cronbach's Alpha* atau *r Alpha* sebesar 0,652. Hal ini membuktikan kuesioner adalah reliabel (dapat diandalkan) karena *r Alpha* yang bernilai lebih besar dari 0,600.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan data-data yang diperoleh dibuat suatu analisis yang merupakan hasil regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana menggambarkan pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Secara umum rumus persamaan regresi linear sederhana adalah $Y = a + bx + e$. Berdasarkan data

yang diperoleh dan telah diolah ke dalam model perhitungan komputer dengan menggunakan program SPSS versi 23 dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18 Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27.368	4.017		6.812	.000
GCG	.361	.091	.298	3.960	.000

a. *Dependent Variable:* Dana BOS

Sumber : Hasil olah data dari SPSS 23, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh koefisien untuk variabel bebas yaitu 0,361 dengan konstanta sebesar 27,368. Sehingga dapat dibuat hasil model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 27,368 + 0,361 X$$

Interpretasi model tersebut di atas, yaitu:

- a. Nilai a (konstanta) sebesar 27,368, artinya apabila GCG (X) nilainya sama dengan nol maka pengelolaan dana BOS nilainya sebesar 27,368.
- b. Nilai koefisien GCG (b) sebesar 0,361. Artinya, setiap ada kenaikan variabel GCG (X) sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pengelolaan dana BOS sebesar 0,361.

b. Pengaruh X Terhadap Y Secara Parsial (Uji t)

Uji partial (uji t) digunakan untuk menguji apakah variabel independen yaitu *good corporate governance* (X) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu dana BOS (Y)

secara parsial. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS dengan tingkat signifikan yang ditetapkan adalah 5% adalah :

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara variabel yang diuji.

Tabel 4.19 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27.368	4.017		6.812	.000
GCG	.361	.091	.298	3.960	.000

a. *Dependent Variable:* Dana BOS

*t tabel = 1,654

Sumber : Hasil olah data dari SPSS 23, 2020

Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai t hitung GCG adalah 3,960. Sedangkan untuk menentukan nilai t tabel pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel t yang sudah ada. Df adalah hasil pengurangan jumlah data dikurangi jumlah variabel penelitian ($163-2 = 161$). Nilai signifikan pada $\alpha=5\%$, sehingga taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Selanjutnya tentukan nilai t tabel dengan melihat tabel t. Pada penelitian ini nilai

signifikansi 0,05 dan Df adalah 161, sehingga diperoleh nilai t tabel adalah 1,654.

Nilai t-hitung GCG > t-tabel ($3,960 > 1,692$), dengan demikian hipotesis diterima. Ini berarti bahwa variabel penerapan GCG signifikan dan berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan tingkat kepercayaan 95%.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila koefisien determinasi $R^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali ($= 0\%$) terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi $R^2 = 1$, berarti variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas.

Letak R^2 berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan $0 \leq R^2 \leq 1$. Besarnya koefisien determinasi variabel terikat dapat diketahui dari skor tabel *coefficient*. secara parsial variabel bebas terhadap atau kuadrat *partial correlation* dari Koefisien determinasi secara simultan diperoleh dari besarnya R^2 atau *adjusted R square*. Nilai *adjusted R square* yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. “Nilai yang mendekati 1 berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat”(Ghozali, 2009).

Tabel 4.20 Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.298 ^a	.089	.083	3.210

Predictors: (Constant), GCG

Sumber : Hasil olah data dari SPSS 23, 2020

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,298 yang berarti korelasi atau hubungan antara penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) mempunyai hubungan yang erat/kuat sebesar 29,8% karena memiliki koefisien korelasi di atas 0,5. *R-square* adalah 0,089 atau 8,9% yang berarti variabel penerapan *good corporate governance* (GCG) mampu menjelaskan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar 8,9%, sedangkan sisanya sebesar 91,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

Hal tersebut dapat dilihat pada pengujian statistik yaitu uji parsial (uji t), hasil dari T_{hitung} sebesar 3,692 dan T_{tabel} sebesar 1,654 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Dengan kriteria pengujian jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan jika signifikan $<$

0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hasilnya penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

Kemudian pada pengujian statistik melalui uji regresi linear sederhana yaitu a = angka kostan *unstandardized coefficients* nilainya sebesar 27,368 dan b = angka koefisien regresi nilainya sebesar 0,361. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat penerapan *good corporate governance* (X) maka akan meningkatkan pengelolaan dana BOS (Y) sebesar 0,361. Serta nilai *R Square* sebesar 0,089 yang artinya sebesar 8,9% pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di pengaruhi oleh penerapan *good corporate governance*, dan 91,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah dasar di kabupaten Luwu telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan beberapa indikator yang digunakan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) antara lain perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dan pelaporan dapat dijadikan tolak ukur dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang baik maka pihak sekolah harus didukung penerapan dari *good corporate governance* dengan prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran dalam mengelolah dana bantuan operasional sekolah

(BOS). Hal ini senantiasa perlu ditingkatkan karena semakin tinggi penerapan *good corporate governance*, maka semakin tinggi tingkat pengelolaan dana BOS.

Salah satu tujuan dari penerapan *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan kualitas suatu organisasi atau instansi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pengetahuan warga sekolah tentang *good corporate governance* (GCG) yaitu dengan melakukan sosialisasi, seminar, dan *workshop* secara berkala mengenai penerapan *good corporate governance* (GCG) secara efektif dan efisien sesuai dengan standar dan peraturan yang ada. Dengan dilakukannya upaya tersebut, warga sekolah dapat meningkatkan kemampuannya dalam menerapkan sistem *good corporate governance* (GCG) tersebut. Selain itu setiap sekolah dasar di kabupaten Luwu perlu melakukan *self-assesment* atau evaluasi internal sekolah secara berkala tentang penerapan *good corporate governance* (GCG). Pihak eksternal juga perlu mengetahui penerapan *good corporate governance* (GCG) dilakukan oleh pihak sekolah secara efektif dan efisien. Evaluasi internal sekolah perlu dilakukan secara periodik setiap tahunnya, sehingga fluktuasi situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang senantiasa berubah dapat ditanggapi oleh pihak sekolah secara tepat.

BAB V

PENUUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut: *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran yang harus dipertimbangkan oleh pihak sekolah antara lain:

1. Dalam penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), pihak pemerintah perlu meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Luwu agar semakin baik kedepannya.
2. Pihak sekolah perlu melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) agar kedepannya pengelolaannya semakin baik.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel yang belum dicantumkan dalam penelitian ini dan pengukuran yang lebih lengkap dan beragam.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. F. 2016. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah: Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* 2 (1): 47-64.
- Alfiningsih, D. F. 2018. Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan di SMK Satria Jakarta. *Skripsi*. Manajemen Pendidikan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Amborowati, A., dan R. Marco. 2016. Analisis Pengelolaan dan Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Website Pada SLTP di Daerah Istimewa Yogyakarta . *Jurnal Ilmia Data Manajemen dan Informasi* 17 (1): 6-14.
- Andi, M., A. R. Murniati, dan N. Usman. 2015. Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4).
- Anggraini, M. 2015. Pengaruh Partisipasi (Ta'awun), Transparansi (Balagha), dan Akuntabilitas (Mas'uliyah) Dana BOS SD Negeri di Desa Gajah Mati Terhadap Kinerja (Amaliyah) Sekolah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Palembang.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Cetakan 13. Rineka Cipta. Jakarta
- Barsani, Muchran, dan A. Jaya. 2018. Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah di SMP Negeri 3 Makassar. *Jurnal Profitabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 2 (2): 15-30.
- Bhawa, G. A. S., I. A. Haris, dan M. Artana. 2014. Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 4 (1).
- Edusaham.com. 2019. Pengertian *good corporate governance*, prinsip dan Implementasi GCG. <https://www.edusaham.com/2019/02/pengertian-good-corporate-governance-prinsip-implementasi-gcg.html>. 30 Desember 2019 (23:17).
- Fauzan. 2014. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Modernisasi* 10 (3): 158-169.

- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Gudono. 2017. *Teori Organisasi*. Edisi keempat. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Hariswati, N. 2015. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS. *Jurnal Ekonomika-Bisnis* 6 (1): 75-88.
- Kaswandi. 2015. Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 027 Tarakan. *Jurnal Kebijakan dan pengembangan pendidikan* 3 (1): 66-74.
- Latifah, H. 2015. Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pencapaian Mutu Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 11 (2): 12-143.
- Nurhidayah, M., Sarsiti. 2017. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri Sragen *Bilingual Boarding School* (SBBS). *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 5 (1): 34-39.
- Nurjana, W. I. 2018. Pengaruh Penerapan *Good School Governance* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Survei pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Lowokwaru). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. 22 Januari 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56. Jakarta.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER/01/MBU/2011 Tahun 2011 *Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*. 01 Agustus 2011.
- Rahayu, A., dan E. L. Setianingsih, (2017). Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 226-239.
- Sapri, A. F. 2017. Pengaruh Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Makassar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar.

- Saputro, B. 2018. Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Evaluasi Perkuliahan Dosen IPA. *Jurnal AKADEMIKA*, 23 (1): 44-56
- Setyowati, S. 2011. Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Studi Situs Di Smp Negeri 1 Wonogiri). *Doctoral dissertation*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Silele, E., H. Sabijono, dan R. J. Pusung. 2017. Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5 (2): 1626-1635
- Sochib. 2016. *Good Corporate Governance Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Grup Penerbitan CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-26. Alfabeta. Jakarta.
- Sulistyanto, S. 2008. *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. PT Grasindo. Jakarta.
- Sumarni, N. 2015. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 6 Satap Rambah Samo. *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi*, 2 (1).
- Sutrisna, K., P. S. Kurniawa, & P. E. D. M. Dewi. 2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Empiris Pada SMA/SMK Negeri Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8 (2): 1-12.
- Sutojo, S., E. J. Aldridge. 2019. *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat)*. Cetakan Pertama. Penerbitan PT. Damar Mulia Pratama. Jakarta.
- Tribunluwu.com, Belopa.2016. Dana BOS Untuk SD dan SMP di Kabupaten Luwu Capai 34 Miliar Tiap Tahun, <https://makassar.tribunnews.com/2016/10/03/dana-bos-untuk-sd-dan-smp-dikabupaten-luwu-capai-rp-34-miliar-tiap-tahun>. 17 Nopember 2019 (01:12).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.

- Universitas Muhammadiyah Palopo. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cetakan Pertama. Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah. Palopo.
- Wahidah, W. 2016. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan dalam Pengelolaan Dana BOS di SMA Muhammadiyah 5 Makassar. *Skripsi*. Pogram Studi Manajemen Pendidikan Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Wahyuningsih, T. D. 2016. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombong Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Ekonomi . Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Widyatmoko, S., dan Suyatmini. 2017. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemasan I Surakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan* 12 (2): 153-160.